



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

Dr. Fajar Laksono Suroso

*THE FINAL INTERPRETER
OF THE CONSTITUTION*

**EPISENTRUM
PERKEMBANGAN HUKUM,
WACANA, DAN ILMU
PENGETAHUAN**

**TREN GLOBAL
DIWARNAI PRO-KONTRA
NON-ELECTION VS ELECTION**

LAPANGAN HUKUM BARU

**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**TIDAK DIKEHENDAKI
SECARA POLITIK**

**PRODUK REFORMASI:
MENATA HUKUM DAN
KETATANEGARAAN**

CABANG KEKUASAAN YANG LEMAH?

JUDICIALIZATION OF POLITICS



'PERMOHONAN'
BUKAN GUGATAN

**HUKUM ACARA
BERKEMBANG
DALAM PRAKTIK**

IUS CURIA NOVIT

**PENGATURAN
HUKUM ACARA DI
UU MK MINIMALIS
[PASAL 28-85]**

AUDI ET ALTERAM PARTEM

PUTUSAN ERGA OMNES

**ASAS PRADUGA KEABSAHAN
(PRINSIP CONSTITUTIONALITY)**

PUTUSAN FINAL AND BINDING

**KARAKTERISTIK
HUKUM ACARA
MAHKAMAH
KONSTITUSI**



KEWENANGAN MK

MEMUTUS SKLN
YANG KEWENANGANNYA
DIBERIKAN OLEH UUD

MEMUTUS
PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK

MENGUJI UU
TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM

MEMBERIKAN PUTUSAN
ATAS PENDAPAT DPR
MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD



KELEMBAGAAN

BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA RI

KETUA DAN WAKIL KETUA MK DIPILIH DARI DAN OLEH HAKIM KONSTITUSI

- masa jabatan 5 tahun
- mengucapkan sumpah di hadapan MK



MK= 9 HAKIM KONSTITUSI

- 3 diajukan DPR, 3 diajukan Presiden, 3 diajukan MA
- minimal usia 55, pensiun 70
- Hakim Konstitusi= pejabat negara
- mengucapkan sumpah di hadapan Presiden

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang MK

MAJELIS KEHORMATAN MK

- menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
- tiga orang: 1 Hakim Konstitusi, 1 akademisi berlatar belakang hukum, 1 tokoh masyarakat

PERSIDANGAN



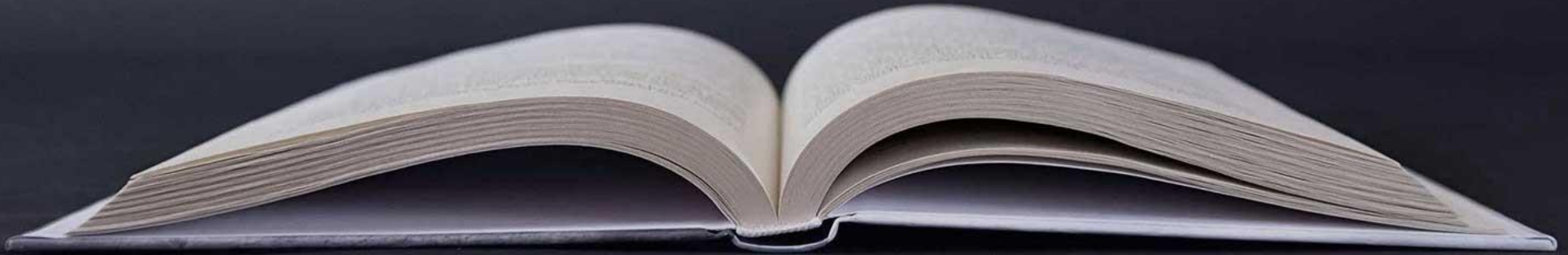
mendengarkan keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait, Ahli, dan/atau Saksi



- penyampaian pokok permohonan
- hasihat hakim



pembahasan perkara dan pengambilan keputusan terhadap perkara



MODIFIKASI PUTUSAN

DIKABULKAN, DITOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA

1. *interpretative decision*
2. *decision of incomptability*
3. *judicial order directed to the lawmakers with deadline*
4. *limited constitutional*
5. *invalidating the law in its entirety*





TERIMA KASIH